

Pendidikan Politik Bagi Siswa SMA Negeri 2 Brebes Sebagai Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Generasi Muda di Kabupaten Brebes

**Bambang Hermanto¹, M. Fikri Amrullah², Stanley Khu³, Lavia Permatasari⁴,
Nur'aini Fadlilah⁵, Balqis Azwa Safrina Nugroho⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Bambang Hermanto

E-mail: bambanghermanto@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertinggi di Jawa Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, yaitu mencapai 1.521.720 pemilih. Namun demikian, tingkat partisipasi pemilih justru terendah se-Jawa Tengah, hanya sebesar 58,27%. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda. Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia 2024 yang diterbitkan BPS, sekitar 64,22 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong pemuda, dan 22 juta di antaranya berada pada rentang usia 16–19 tahun atau setara dengan siswa SMA. SMA Negeri 2 Brebes sebagai sekolah unggulan dengan 1.254 siswa menjadi representasi penting dalam upaya peningkatan kesadaran politik. Namun, sekolah ini belum memiliki kurikulum, program reguler, maupun referensi yang memadai terkait pendidikan politik. Melihat permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah penyelenggaraan Seminar Pendidikan Politik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman siswa mengenai hak dan tanggung jawab politik, sekaligus meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Program ini juga mendukung pencapaian SDG's 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat, khususnya pada indikator peningkatan partisipasi politik.

Kata kunci – partisipasi politik, pemilih pemula, pendidikan politik, SDGs 16, SMA Negeri 2 Brebes

Abstract

Brebes Regency recorded the highest number of registered voters (DPT) in Central Java during the 2024 Regional Head Election, reaching 1,521,720 voters. However, the voter turnout was the lowest in the province, at only 58.27%. This condition suggests a lack of political awareness among the community, particularly among the younger generation. According to the 2024 Youth Statistics published by BPS, approximately 64.22 million Indonesians are categorized as youth, with 22 million aged 16–19 years, equivalent to high school students. SMA Negeri 2 Brebes, as an accredited leading school with 1,254 students, plays a significant role in efforts to enhance political awareness. Nevertheless, the school does not yet have a specific curriculum, regular programs, or adequate references related to political education. To address these issues, a Political Education Seminar was implemented as part of a community engagement program. This activity is designed to enhance students' understanding of their political rights and responsibilities, while also increasing youth participation in democratic processes. Furthermore, this program contributes to achieving SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions, particularly by promoting inclusive political participation.

Keywords - first-time voters, political education, political participation, SDGs 16, SMA Negeri 2 Brebes

PENDAHULUAN

Kabupaten Brebes tercatat sebagai daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Provinsi Jawa Tengah pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Berdasarkan hasil Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024 yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, jumlah pemilih di Kabupaten Brebes mencapai 1.521.720 orang. Angka tersebut menempatkan Brebes di urutan pertama, diikuti oleh Kabupaten Cilacap dengan 1.520.562 pemilih dan Kabupaten Banyumas dengan 1.392.370 pemilih. Meskipun jumlah angka DPT di Kabupaten Brebes tertinggi se-Jawa Tengah, namun justru angka partisipasi pemilih di Kabupaten Brebes berbanding terbalik. Publikasi KPU Jawa Tengah pada 14 Desember 2024 melalui Akun Media Instagram menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Brebes hanya 58,27%, disusul Kabupaten Pemalang sebesar 58,41%, dan Kabupaten Jepara sebesar 65,26%.

Penurunan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 dipengaruhi oleh faktor politik, kelembagaan, dan aksesibilitas yang saling berkaitan. Ketidaksesuaian antara kandidat yang diusung partai politik dengan aspirasi publik membuat sebagian pemilih enggan menggunakan hak pilih (Rahayu, 2024). Kedekatan waktu penyelenggaraan Pilkada dengan pemilu presiden dan legislatif turut menimbulkan kejenuhan politik, keterbatasan persiapan, serta singkatnya masa kampanye (Basyari, 2024). Selain itu, aspek aksesibilitas, termasuk kondisi geografis dan cuaca, berkontribusi terhadap rendahnya kemampuan pemilih menjangkau TPS (Ledgerwoord & Lally, 2024).

Berdasarkan *Data Statistik Pemuda Indonesia 2024* yang dirilis BPS, jumlah pemuda Indonesia mencapai 64,22 juta jiwa atau sekitar 20% dari total populasi nasional. Meskipun bukan kelompok mayoritas, jumlah tersebut memiliki signifikansi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, sejalan dengan agenda peningkatan kualitas pemuda dalam RPJMN 2020–2024 (Perpres No. 52/2023). Dari total tersebut, sekitar 22 juta jiwa berada pada rentang usia 16–19 tahun, yaitu kelompok yang mayoritas masih menempuh pendidikan di tingkat SMA atau sederajat.

Pendidikan berperan fundamental dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai sistem politik, nilai demokrasi, dan pentingnya partisipasi publik. Selain pengetahuan teoritis, pendidikan juga melatih keterampilan berpikir kritis, kemampuan berargumentasi, serta kesadaran sosial sebagai landasan partisipasi politik. Tanpa pendidikan memadai, masyarakat cenderung pasif dan rentan terhadap manipulasi informasi. Dalam konteks generasi muda, kesadaran politik menjadi aspek strategis karena tingkat partisipasi mereka berpengaruh pada arah pembangunan daerah dan bangsa (Heriyanto, 2024). Generasi muda sendiri dipahami dalam berbagai perspektif: secara luas mencakup individu sejak kanak-kanak hingga dewasa (Daradjat, 1991), dalam persepsi umum diidentikkan dengan remaja hingga awal dewasa, sementara secara hukum berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 dikategorikan sebagai kelompok usia 16–30 tahun. Dengan demikian, secara operasional generasi muda dapat diposisikan pada jenjang pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi.

Siswa SMA sebagai bagian dari generasi muda memiliki peran strategis dalam dinamika pemerintahan, karena masa depan bangsa bertumpu pada mereka. Masa remaja, khususnya tingkat SMA, merupakan fase penting dalam pendidikan karena kemampuan siswa untuk menyerap konsep akademik sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sosial. Namun, pendidikan politik di sekolah masih terbatas, sementara pemahaman yang diperoleh melalui media sering kali tidak ideal. Oleh karena itu, penting bagi siswa SMA mempelajari konsep politik secara benar guna mencegah kesalahpahaman. Pendidikan politik sejak usia dini diyakini berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran politik, mendorong partisipasi aktif, serta membentuk kesiapan generasi muda dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Salah satu sekolah di Kabupaten Brebes dengan jumlah siswa (generasi muda) yang banyak adalah SMA Negeri 2 Brebes. Berdasarkan data Sekolah Kita Kemdikbud menunjukkan bahwa SMA Negeri 2 Brebes 1.254 siswa yang terbagi dalam 36 Rombongan Belajar (Rombel), sebagai sekolah

unggulan dengan akreditasi A. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dalam wawancara pada 27 Februari 2025 menyampaikan bahwa belum ada pendidikan politik bagi siswa di SMA Negeri 2 Brebes (Sekolah Kita, 2025). Sehingga pengetahuan siswa sebagai generasi muda mengenai politik masih rendah, termasuk pengetahuan sebagai calon pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Brebes yang akan datang. Menurut Lopes, Benton & Cleaver (2009), di tingkat sekolah, demografi siswa, program sekolah, dan aktivitas yang ada berpengaruh terhadap pengetahuan serta efektivitas politik siswa.

Generasi muda kerap dipandang sebagai penggerak perubahan dan inovasi, namun partisipasi mereka dalam proses politik masih rendah, termasuk dalam pemilihan presiden. Rendahnya keterlibatan ini dipengaruhi oleh hambatan seperti keterbatasan pemahaman sistem politik, rendahnya kepercayaan diri, serta kurangnya pengetahuan politik (Firmanto, 2023).

Pendidikan politik memiliki peran krusial dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Kantaprawira (1988) menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, sehingga rakyat perlu dibekali kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dalam konteks Indonesia, pendidikan politik diarahkan pada beberapa tujuan, yaitu: (a) memahami dinamika sosial-politik yang sarat dengan potensi konflik, (b) memperjuangkan kepentingan kolektif dan ideologi demi kesejahteraan bersama, (c) memiliki keberanian untuk mengambil sikap tegas dalam menciptakan kondisi yang harmonis, serta (d) menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

David Easton (dalam Sirozi, 2005) menyatakan bahwa keberlangsungan suatu sistem politik sangat bergantung pada proses internalisasi pengetahuan, nilai, dan sikap yang dilakukan oleh generasi muda ketika mereka memasuki usia dewasa. Generasi muda diharapkan mampu menguasai dan menghayati unsur-unsur tersebut sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan sistem yang berlaku. Dengan demikian, terlepas dari kualitas suatu sistem politik—baik dinilai positif maupun negatif—keberadaannya tetap dapat dipertahankan.

Pendidikan politik penting untuk diberikan kepada siswa SMA/Sederajat sebagai generasi muda yang akan menjadi pemilih pemula. Partisipasi politik tidak muncul secara spontan, melainkan memerlukan usaha dan pembiasaan dalam keterlibatan proses politik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi politik serta dampaknya terhadap kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari. Sebuah studi menyatakan bahwa perilaku politik diperoleh melalui pembelajaran sejak masa kanak-kanak. Maka, harus ada usaha untuk membentuk dan meningkatkan kebiasaan partisipasi politik sejak dini. Dalam hal ini, pendidikan politik hadir sebagai cara, usaha untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. (Sukmawati dan Rafni, 2020) menambahkan bahwa pendidikan politik yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat, baik dalam pemilu maupun keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik.

Pendidikan politik adalah hal penting untuk mencegah terjadinya risiko-risiko regresi demokrasi. Menurut Nurdiansyah (2015) terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi apabila pendidikan politik tidak dilaksanakan. Risiko-risiko seperti masyarakat yang buta politik (apatis), masyarakat yang tidak mau menggunakan hak suaranya dalam pemilu, bahkan masyarakat yang beranggapan bahwa tak ada manfaatnya berpartisipasi dalam politik. Berbagai risiko tersebut merupakan suatu keniscayaan apabila pendidikan politik tidak diberikan. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi instrumen penting dalam membangun budaya demokrasi yang kuat, mendorong partisipasi aktif, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupannya.

Partisipasi politik dipahami sebagai keterlibatan individu maupun kelompok dalam aktivitas politik untuk memilih pemimpin dan memengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung (Miriam Budiardjo; Avenus & Alfina, 2020). Bentuknya dapat berupa pemungutan

suara, keanggotaan partai politik atau kelompok kepentingan, keterlibatan dalam demonstrasi, hingga komunikasi dengan pejabat pemerintah (Verba, Nie, & Kim, 1978). Tingkat partisipasi politik mencerminkan kesadaran dan kepedulian warga terhadap jalannya pemerintahan, yang pada gilirannya memengaruhi legitimasi dan efektivitas kebijakan. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat merupakan syarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Partisipasi masyarakat dalam proses politik, baik melalui pemberian suara maupun bentuk keterlibatan lainnya, didorong oleh keyakinan bahwa aspirasi serta kepentingan mereka dapat disalurkan atau setidaknya dipertimbangkan melalui aktivitas kolektif tersebut. Selain itu, terdapat kepercayaan bahwa keterlibatan bersama tersebut, meskipun terbatas, memiliki kemungkinan untuk memengaruhi keputusan para aktor yang berwenang dalam menetapkan kebijakan yang bersifat mengikat (Alamri et al., 2024).

Berdasarkan analisis situasi, SMA Negeri 2 Brebes yang menjadi mitra disimpulkan memiliki persoalan yakni belum adanya pendidikan politik kepada siswa yang menjadi program reguler sekolah sehingga pengetahuan siswa mengenai politik masih kurang yang dapat berdampak pada rendahnya angka partisipasi pemilih di Kabupaten Brebes. Generasi muda memegang peranan strategis dalam penguatan kualitas demokrasi. Salah satu kelompok yang termasuk dalam kategori tersebut adalah siswa SMA, yang memiliki potensi signifikan sebagai calon pemilih pemula. Di SMA Negeri 2 Brebes, tercatat sebanyak 1.254 siswa yang dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu maupun pilkada. Namun demikian, masih terdapat permasalahan mitra berupa ketiadaan program reguler sekolah yang berfokus pada pendidikan politik. Padahal, pendidikan politik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan politik bagi siswa SMA Negeri 2 Brebes sebagai upaya mendorong peningkatan partisipasi politik generasi muda, khususnya di Kabupaten Brebes.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam tiga tahap: persiapan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan pelaporan. Analisis situasi mitra pengabdian adalah langkah pertama dalam tahap persiapan. Kemudian, koordinasi dengan mitra pengabdian tentang siswa yang akan terlibat dalam pendidikan politik. Terakhir, menyusun rencana program pengabdian bersama tim dan mitra pengabdian.

Tahap kedua adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan Seminar Pendidikan Politik, Stanley Khu S.Ant., M.A mempunyai peran sebagai pengajar tamu di SMA Negeri 2 Brebes. Berikutnya pelaksanaan Seminar Pendidikan Politik yang diikuti seluruh anggota Majelis Perwakilan Kelas di SMA Negeri 2 Brebes. Pada kegiatan ini diisi oleh dosen Ilmu Politik FISIP UNNES yaitu Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP. sekaligus ketua pengabdian. Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP., Stanley Khu S.Ant., dan M. Fikri Amrullah S.Pd., M.Pd, mempunyai peran mengkoordinasikan pelaksanaan Seminar Pendidikan Politik dengan mengundang narasumber Influencer Muda untuk meningkatkan motivasi siswa. Kegiatan pengabdian juga melibatkan mahasiswa semester 5 Program Studi Ilmu Politik FISIP UNNES yaitu Lavia Permatasari, Nur'aini Fadlilah, dan Balqis Azwa Safrina Nugroho. Mahasiswa mempunyai peran sebagai pembawa acara, moderator, dan mengatur konsumsi untuk peserta. Selain itu mahasiswa juga berperan dalam percetakan baik proposal maupun laporan, dokumentasi kegiatan, dan kegiatan lain yang bersifat administrasi.

Tahap ketiga atau terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahapan ini evaluasi dilakukan terkait apakah pelaksanaan pengabdian berjalan dengan lancar atau adakah kendala yang dihadapi serta analisis dari hasil seminar. Hasil evaluasi kemudian ditulis dalam bentuk laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari keseluruhan tahapan pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pendidikan Politik bagi Siswa SMA Negeri 2 Brebes sebagai Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Generasi Muda di Kabupaten Brebes” telah sukses dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Agustus 2025. Kegiatan ini bertempat di ruang pertemuan SMA Negeri 2 Brebes dan diikuti oleh siswa-siswi dari berbagai organisasi sekolah. Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Tedy, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan politik ini. Menurut beliau, kegiatan semacam ini sangat penting karena menjadi sarana bagi sekolah dalam menanamkan wawasan kebangsaan, membentuk karakter kepemimpinan, serta menumbuhkan kesadaran politik pada siswa sejak dini. Ia juga menekankan bahwa pendidikan politik bukan hanya sebatas teori, melainkan bekal praktis yang dapat membantu para siswa dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, khususnya ketika kelak mereka menjadi pemilih pemula yang berpartisipasi dalam pemilu.



Gambar 1.

Penyerahan Kenang-kenangan dari Tim Pengabdian kepada SMA Negeri 2 Brebes dalam Pembukaan Pendidikan Politik

Adapun pemateri dalam kegiatan ini terdiri dari dua narasumber dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi. Pemateri pertama adalah Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP., Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Negeri Semarang (UNNES). Dalam penyampaian materinya, beliau menekankan pentingnya partisipasi politik generasi muda dalam setiap proses pemilu. Ia menjelaskan bahwa generasi muda merupakan kelompok pemilih terbesar di Indonesia sehingga memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Selain itu, beliau juga menyoroti peran penting pendidikan politik sebagai sarana untuk membangun kesadaran demokrasi sejak dini. Pendidikan politik dipandang mampu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai hak dan kewajiban politik, cara menggunakan hak pilih secara cerdas, serta bagaimana bersikap kritis terhadap berbagai isu sosial dan politik yang berkembang di masyarakat.

Pemateri kedua adalah Ramanda Bima Prayuda, seorang mahasiswa berprestasi yang berhasil meraih gelar Best Speaker dalam Lomba Debat Politik Mahasiswa Tingkat Nasional. Dalam materinya, ia memberikan perspektif inspiratif dari kalangan muda mengenai bagaimana generasi milenial dan Gen Z dapat berperan aktif dalam dunia politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan gaya komunikasi yang dekat dengan siswa, Ramanda menekankan bahwa anak muda tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga dapat menjadi subjek yang mampu memberi warna baru dalam praktik demokrasi. Ia mencontohkan berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh pemuda, mulai dari menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, aktif dalam organisasi, hingga menyuarakan aspirasi melalui ruang publik dan media digital. Kehadiran Ramanda sebagai pemateri memberikan motivasi tambahan bagi para siswa bahwa anak muda pun memiliki kesempatan yang luas untuk

berkontribusi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.



Gambar 2.

Penyampaian Materi Pendidikan Politik oleh Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP.

Peserta kegiatan ini berjumlah 50 siswa-siswi SMA Negeri 2 Brebes yang dipilih dari berbagai organisasi sekolah, yaitu OSIS, Pramuka, PMR, dan Tonsus. Pemilihan peserta dari organisasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan siswa yang aktif, memiliki pengalaman berorganisasi, dan dianggap mampu menjadi agen perubahan sekaligus contoh bagi teman-teman sebaya di lingkungan sekolah. Dengan demikian, keikutsertaan mereka diharapkan tidak hanya memberi manfaat secara pribadi, tetapi juga dapat menularkan pengetahuan dan semangat berpartisipasi politik kepada siswa lain di SMA Negeri 2 Brebes.

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme peserta tampak sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui keaktifan mereka dalam mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab. Para siswa tidak hanya mendengarkan pemaparan materi, tetapi juga berani mengajukan pertanyaan yang kritis dan relevan dengan kondisi nyata. Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain menyangkut peran pemilih pemula dalam menentukan arah kebijakan publik, bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi praktik politik uang yang kerap terjadi pada masa pemilu, serta strategi untuk menjaga idealisme agar pilihan politik tetap berdasarkan pada hati nurani dan bukan karena pengaruh eksternal.

Keberanian siswa-siswi untuk mengemukakan pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia politik dan demokrasi. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa kegiatan pendidikan politik semacam ini mampu menumbuhkan kesadaran kritis serta mendorong lahirnya generasi muda yang lebih peduli terhadap keberlangsungan demokrasi di Kabupaten Brebes maupun Indonesia secara umum.



Gambar 3.

Tanya Jawab dengan Siswa SMA Negeri 2 Brebes

Secara umum, kegiatan pendidikan politik ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Hal ini tampak dari beberapa indikator keberhasilan yang menonjol. Pertama, tingkat keterlibatan peserta sangat tinggi, terlihat dari keaktifan mereka dalam menyimak pemaparan materi, mengajukan pertanyaan, hingga memberikan tanggapan pada sesi diskusi. Antusiasme ini menunjukkan bahwa topik yang diangkat memang relevan dengan kebutuhan dan rasa ingin tahu generasi muda, khususnya siswa SMA sebagai calon pemilih pemula.

Kedua, penyampaian materi oleh narasumber dinilai mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang komunikatif serta dilengkapi dengan contoh konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut memungkinkan siswa tidak hanya memahami konsep politik secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan realitas sosial dan politik di lingkungan sekitarnya.

Ketiga, terdapat dukungan penuh dari pihak sekolah, yang tidak hanya menyediakan fasilitas kegiatan, tetapi juga menyampaikan komitmen untuk menjadikan pendidikan politik sebagai bagian dari program pembinaan siswa secara berkelanjutan. Pihak sekolah menilai bahwa kegiatan ini sejalan dengan misi pendidikan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan, sehingga sangat layak untuk dilakukan secara rutin setiap tahun. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, kegiatan ini bukan hanya sekadar berlangsung tanpa hambatan, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata, baik bagi siswa sebagai peserta, maupun bagi sekolah sebagai institusi pendidikan yang peduli terhadap peningkatan kesadaran politik generasi muda.



Gambar 4.

Dukungan Kerjasama dari Kepala SMA Negeri 2 Brebes

Kegiatan pendidikan politik ini mengindikasikan bahwa pemilih pemula menunjukkan minat dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isu-isu politik apabila disediakan ruang yang memadai serta metode penyampaian yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. Temuan ini sejalan dengan pandangan Almond dan Verba (1963) dalam *The Civic Culture*, yang menegaskan pentingnya budaya kewargaan (*civic culture*) sebagai landasan partisipasi politik yang sehat. Dengan diperkenalkan pada nilai-nilai politik sejak dini, generasi muda akan lebih siap untuk berperan sebagai warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam mendukung proses demokrasi.

Lebih lanjut, Huntington dan Nelson (1976) menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan siswa mengenai peran pemilih pemula, praktik politik uang, hingga idealisme politik menunjukkan bahwa mereka sudah mulai menampilkan bentuk awal partisipasi politik non-konvensional, yaitu dalam bentuk diskusi, kritik, dan kesadaran kolektif. Dengan bekal pendidikan politik yang berkelanjutan, diharapkan

kesadaran ini berkembang menjadi partisipasi politik konvensional, seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu secara cerdas dan bertanggung jawab.

Selain itu, kehadiran narasumber dari kalangan akademisi dan mahasiswa berprestasi memberikan keseimbangan perspektif antara teori akademis dan pengalaman praktis. Hal ini mendukung teori partisipasi politik modern yang menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya lahir dari pemahaman rasional semata, tetapi juga dari keteladanan, inspirasi, dan pengalaman nyata yang dapat ditiru oleh generasi muda. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk strategi political socialization (sosialisasi politik), di mana generasi muda diberikan pengetahuan, nilai, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi bagian dari sistem politik. Apabila dilakukan secara berkesinambungan, kegiatan seperti ini berpotensi memperkuat partisipasi politik generasi muda di Kabupaten Brebes sekaligus mendukung peningkatan kualitas demokrasi Indonesia secara umum.

Kegiatan pendidikan politik bagi siswa SMA Negeri 2 Brebes sebagai pemilih pemula memiliki keterkaitan langsung dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin 16, yakni *Peace, Justice, and Strong Institutions* (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). SDGs 16 menekankan urgensi pembentukan masyarakat yang damai dan inklusif, penyediaan akses terhadap keadilan, serta penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di berbagai tingkatan pemerintahan.

Mendorong partisipasi inklusif dalam politik

Pendidikan politik yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Brebes tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan kognitif mengenai sistem pemerintahan dan demokrasi, tetapi juga menjadi arena praktik demokrasi sejak dini yang bersifat aplikatif. Dalam konteks teori pendidikan politik, hal ini sejalan dengan pandangan Almond dan Verba (1963) mengenai civic culture, di mana partisipasi politik individu dibentuk melalui proses sosialisasi yang berkelanjutan sejak usia muda. Program ini dapat dipandang sebagai strategi institusional untuk memperkuat kapasitas siswa sebagai *political actors* yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi.

Lebih jauh, implementasi pendidikan politik di sekolah memiliki relevansi langsung dengan pencapaian indikator 16.7 Sustainable Development Goals (SDGs), yang menekankan pentingnya terciptanya proses pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua tingkatan. Pendidikan politik di tingkat SMA menjadi bentuk konkret internalisasi nilai-nilai demokrasi yang menempatkan siswa bukan hanya sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki daya kritis terhadap kebijakan publik. Dengan demikian, keterlibatan pemilih pemula melalui simulasi pemilu, diskusi kelas, atau kegiatan organisasi siswa mampu memperkuat kesadaran bahwa demokrasi bukan sekadar hak prosedural untuk memilih, melainkan juga tanggung jawab moral dan sosial dalam menentukan arah pembangunan masyarakat.

Dari perspektif praktis, pendidikan politik yang berbasis pengalaman (*experiential learning*) ini menumbuhkan *political efficacy*—yakni keyakinan individu bahwa partisipasinya memiliki dampak terhadap proses politik (Easton & Dennis, 1969). Hal ini penting untuk membangun generasi muda yang tidak apatis, melainkan memiliki kepercayaan diri dalam menyuarakan aspirasi. Dengan demikian, pendidikan politik di SMA Negeri 2 Brebes dapat dianggap sebagai fondasi dalam menumbuhkan kesadaran kritis generasi muda, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Menguatkan budaya politik partisipatif

Kegiatan pendidikan politik ini memiliki relevansi erat dengan indikator 16.6 Sustainable Development Goals (SDGs), yang menekankan pentingnya pembangunan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, indikator ini menuntut adanya institusi politik yang mampu menjaga legitimasi publik melalui tata kelola yang baik (*good governance*) serta menjamin akses masyarakat terhadap keadilan dan kepercayaan publik (United

Nations, 2015). Melalui pendidikan politik di sekolah, siswa tidak hanya dibekali pengetahuan normatif tentang sistem politik, tetapi juga dilatih untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi yang substansial.

Salah satu bentuk implementasi pendidikan politik adalah melalui pemahaman mendalam mengenai peran strategis pemilu yang jujur dan adil sebagai sarana utama sirkulasi kekuasaan. Hal ini sejalan dengan gagasan Dahl (1989) tentang polyarchy, yang menekankan pentingnya kompetisi politik yang terbuka dan partisipasi warga negara yang luas. Dengan demikian, siswa sebagai pemilih pemula diberikan ruang untuk mengembangkan sikap kritis terhadap praktik-praktik politik yang menyimpang, seperti politik uang, manipulasi suara, maupun kooptasi elite. Proses ini bukan hanya membentuk kesadaran kritis, tetapi juga memperkuat kapasitas mereka dalam menjadi critical citizens (Norris, 1999) yang mampu menuntut integritas dari para aktor politik.

Lebih lanjut, pendidikan politik juga berfungsi sebagai instrumen internalisasi nilai-nilai idealisme politik yang berorientasi pada keadilan, integritas, dan akuntabilitas. Pendidikan semacam ini memiliki implikasi jangka panjang bagi penguatan institusi demokrasi, khususnya di tingkat lokal, karena generasi muda dibekali kesadaran untuk menolak praktik politik transaksional dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan demikian, pendidikan politik di sekolah dapat dipandang sebagai pondasi fundamental dalam menciptakan warga negara yang berintegritas, partisipatif, serta berdaya kritis terhadap dinamika politik yang berkembang di masyarakat.

Meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan

Kegiatan diskusi yang membahas praktik demokrasi serta berbagai tantangan politik yang terjadi di lapangan memiliki nilai strategis dalam membangun kapasitas politik siswa. Diskusi semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan teoretis mengenai demokrasi, tetapi juga menjadi medium pembentukan karakter kewarganegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai fundamental kehidupan bernegara. Nilai-nilai seperti keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum menjadi aspek penting dalam memperkuat fondasi demokrasi yang berkelanjutan (Held, 2006). Dengan demikian, proses pembelajaran tidak berhenti pada ranah kognitif, melainkan meluas pada ranah afektif dan normatif yang berperan dalam membentuk kepribadian politik siswa.

Secara lebih luas, proses ini berkaitan erat dengan indikator 16.3 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menegaskan pentingnya menjamin akses keadilan yang setara bagi seluruh individu tanpa diskriminasi. Pendidikan politik melalui metode diskusi di sekolah merupakan salah satu wujud konkret implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan, karena mendorong siswa untuk memahami demokrasi tidak semata sebagai prosedur elektoral, melainkan sebagai suatu sistem yang berlandaskan pada prinsip hukum yang adil, inklusif, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara (United Nations, 2015). Dengan demikian, generasi muda dipersiapkan tidak hanya sebagai pemilih yang rasional, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki kesadaran kritis terhadap praktik politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif.

Lebih lanjut, diskusi yang mengangkat isu-isu politik kontemporer dapat meningkatkan political literacy siswa, yakni kemampuan memahami, menilai, dan merespons dinamika politik secara reflektif (Milner, 2002). Literasi politik ini sangat penting dalam membangun rule of law culture, yaitu budaya yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan politik berbasis diskusi bukan hanya relevan bagi penguatan demokrasi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak warga negara yang berintegritas, kritis, serta memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial.

Membangun generasi muda sebagai agen perdamaian dan perubahan

Political awareness atau kesadaran politik yang meningkat di kalangan pemilih pemula

menandai transformasi signifikan dalam partisipasi politik generasi muda. Jika sebelumnya mereka lebih sering diposisikan sekadar sebagai penonton dalam proses demokrasi, kini generasi muda mulai tampil sebagai aktor penting yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah pembangunan politik dan sosial. Kesadaran politik ini lahir melalui proses sosialisasi politik yang intens, baik melalui pendidikan formal di sekolah, media digital, maupun interaksi dalam organisasi kemasyarakatan. Almond dan Verba (1963) menekankan bahwa partisipasi politik yang sehat sangat ditentukan oleh civic culture yang mendorong warga untuk merasa terlibat dalam proses politik.

Peningkatan kesadaran politik mendorong generasi muda untuk berpartisipasi secara sehat, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan demokrasi, baik melalui pemilu maupun keterlibatan dalam organisasi sosial-politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Verba, Scholzman, dan Brady (1995) yang menekankan bahwa partisipasi politik tidak hanya berbentuk pemungutan suara, melainkan juga keterlibatan dalam berbagai bentuk aktivitas kolektif yang memengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian, partisipasi aktif pemilih pemula menjadi modal penting dalam memperjuangkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif.

Lebih jauh, dari perspektif pembangunan berkelanjutan, kesadaran politik generasi muda selaras dengan indikator dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 16, yang menekankan pentingnya membangun institusi yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Generasi muda yang memiliki political awareness tinggi dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terwujudnya demokrasi substantif, di mana nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran politik di kalangan pemilih pemula dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam memperkuat kualitas demokrasi sekaligus memperluas ruang keadilan sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pendidikan Politik bagi Siswa SMA Negeri 2 Brebes sebagai Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Generasi Muda di Kabupaten Brebes” berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan. Antusiasme siswa dalam mengikuti seminar, mengajukan pertanyaan kritis, dan terlibat aktif dalam diskusi menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki minat yang besar terhadap isu politik ketika difasilitasi dengan metode yang sesuai. Materi yang disampaikan oleh narasumber berhasil memperkuat pemahaman siswa tentang pentingnya partisipasi politik generasi muda, peran strategis pemilu yang jujur dan adil, serta nilai-nilai idealisme politik yang berorientasi pada keadilan dan integritas.

Selain itu, kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 16. Pertama, mendukung indikator 16.7 melalui peningkatan partisipasi politik yang inklusif, responsif, dan representatif. Kedua, relevan dengan indikator 16.6 karena mendorong lahirnya generasi muda yang kritis terhadap praktik politik menyimpang sekaligus berkomitmen menjaga integritas demokrasi. Ketiga, selaras dengan indikator 16.3 yang menekankan kesetaraan akses terhadap keadilan melalui penanaman nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum sejak dini. Dengan demikian, pendidikan politik di sekolah terbukti efektif sebagai sarana sosialisasi politik yang strategis dalam membangun kesadaran kritis, meningkatkan political awareness, serta mempersiapkan generasi muda sebagai agen perubahan dan penjaga keberlangsungan demokrasi yang damai, adil, dan inklusif.

Ke depan, untuk memperkuat keberlanjutan dampak kegiatan, disarankan agar program pendidikan politik ini tidak berhenti pada seminar saja, melainkan dikembangkan melalui beberapa langkah lanjutan. Pertama, mengadakan kelas diskusi rutin atau forum politik pelajar di tingkat sekolah agar siswa dapat terus berlatih berpikir kritis dan menyuarakan pandangannya. Kedua, menyelenggarakan simulasi pemilu di lingkungan sekolah sebagai sarana praktik langsung tentang mekanisme demokrasi, mulai dari proses pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. Ketiga,

membentuk komunitas duta demokrasi muda yang beranggotakan siswa terpilih untuk menjadi agen sosialisasi politik di kalangan sebaya. Keempat, menjalin kerja sama berkelanjutan dengan KPU, Bawaslu, dan organisasi masyarakat sipil guna memperluas akses siswa terhadap pengetahuan politik praktis dan literasi demokrasi. Dengan rangkaian tindak lanjut ini, diharapkan pendidikan politik tidak hanya meningkatkan pemahaman teoretis, tetapi juga membentuk kebiasaan partisipasi aktif yang berakar kuat pada generasi muda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian serta penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang atas dukungan finansial yang memungkinkan kegiatan dapat berlangsung dengan baik hingga artikel ini terselesaikan. Penghargaan juga diberikan kepada pihak sekolah, khususnya SMA Negeri 2 Brebes, yang telah menyediakan kesempatan dan fasilitas untuk pelaksanaan program pendidikan politik bagi siswa. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada tim pengabdian, narasumber, serta para siswa yang berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini mampu memberikan manfaat nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, J., Bena, M., Katili, Y., & Tabo, S. (2023). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial. *Journal Governance And Politics (Jgp)*, 3(1), 53-62.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Asy'ari H, dkk. (2022). *Modul Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Pendekatan Budaya Populer*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585-610.
- Basyari I. Kemendagri identifikasi delapan penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. *Kompas*; 2024. Tersedia dari: <https://www.kompas.id/artikel/kemendagriidentifikasi-delapan-penyebabrendahnya-partisipasi-pemilihdi-pilkada-2024/>
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Daradjat Z. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang; 1991.
- Easton, D., & Dennis, J. (1969). *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy*. McGraw-Hill.
- Firmanto F. (2023). Peran Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pemilihan Presiden 2024. *J Ilmu Hukum*;1:21-5.
- Held, D. (2006). *Models of Democracy (3rd ed.)*. Stanford University Press.
- Heriyanto T (2024). Kesadaran Politik Di Kalangan Generasi Muda Perlu Terus Ditingkatkan. *PaturaNews*; Tersedia dari: <https://paturanews.com/index.php/paturanews/baca/263120/>
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kantaprawira R. *Sistem politik Indonesia: suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru; 1988.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 116 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Serentak 2024 Di Jawa Tengah . Tersedia dari: <https://www.instagram.com/kpujateng/> [diakses 3 Maret 2025].

- Lally C, Ledgerwood E. Election turnout: Why do some people not vote?. 2024. Tersedia dari: <https://post.parliament.uk/election-turnoutwhy-do-some-people-not-vote/>
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM bidang EkoSosBudKum (ekonomi, sosial, budaya, dan hukum)*, 3(2), 14-28.
- Lopes, J., Benton, T., & Cleaver, E. (2009). Young people's intended civic and political participation: does education matter?. *Journal of youth studies*, 12(1), 1-20.
- Milner, H. (2002). *Civic Literacy: How Informed Citizens Make Democracy Work*. University Press of New England.
- Norris, P. (1999). *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*. Oxford University Press.
- Nurdiansyah, E. (2015). Implementasi pendidikan politik bagi warga negara dalam rangka mewujudkan demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 2(1), 54-58.
- Rahayu KY. (2024). Partisipasi rendah, hukuman masyarakat untuk parpol di Pilkada 2024 . Kompas; 2024 Desember.
- Statistik, I. B. P. (2018). *Statistik pemuda Indonesia...* (No Title).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- Sekolah Kita. SMA Negeri 2 Brebes (20326436). 2025. Tersedia dari: <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/chome/profil/E563AF85-DA6D-4FD8-A8AF-B75ABF56CEC5>
- Sirozi, M. (2005). *Politik pendidikan: Dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan*. RajaGrafindo Persada.
- Sukmawati, A., & Rafni, A. (2020). Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 3(2), 191-199.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. *United Nations General Assembly*.
- Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. O. (1978). *Participation and political equality: A seven-nation comparison*. Cambridge university press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. *Harvard University Press*.